<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak>
ISSN: 2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453

ARTICLE INFORMATION

Received February 27th 2020

Accepted July 29th 2020

Published July 31th 2020

DOI:

<https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan

Dewi Aprilianti¹⁾, Mulyaning Wulan²⁾, Herwin Kurniawan³⁾

^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

email: dewiaprilianti9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Jakarta Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jakarta Selatan, yaitu Kantor Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang melibatkan 10 Kantor Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan survei. Pemrosesan data menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis menunjukkan bahwa pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan secara parsial dan simultan memengaruhi dan secara signifikan memengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci: Kejelasan Target Anggaran; Pengendalian Internal; Sistem Pelaporan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Clarity of Budget Targets, Internal Control, and Reporting Systems on the Performance of Government Agencies in South Jakarta District. The sample in this study is the District of South Jakarta, namely the Cilandak District Office, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, and Tebet. This study uses multiple linear regression analysis involving 10 District Offices of South Jakarta Region as a sample. The data used are primary data by conducting a survey. Data processing uses multiple linear regression analysis. The analysis shows that the influence of the Clarity of Budget Goals, Internal Control, and the Reporting System partially and simultaneously influences and significantly influences the Performance of Government Agencies.

Keywords: Clarity of Budget Targets; Internal Control; Reporting Systems; Government Agency Performance Accountability

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik mengenai kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian saat ini untuk mempercepat peningkatan kualitas pencapaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (Kaltsum, dkk., 2014 : 26).

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai (Bhakti, dkk., 2015 : 32). Anggaran yang tidak jelas sasarannya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk itu kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas (Hazmi, dkk., 2012 : 67).

Pengendalian Internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015 : 218). Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016 : 129).

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Gayatri, dkk., 2016 : 44).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan beberapa tahapan yaitu penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat diketahui dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah.

Sumber: Kementerian PAN-RB

Gambar 1. Rapor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-rata Periode 2012-2015

Pelaksanaan good governance juga akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah (Astuti, 2013 : 49).

Salah satu cara pemerintah dalam menunjukkan pertanggungjawabannya dengan menggunakan prinsip transparansi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcome terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (Astuti, 2013 : 49). Laporan umpan balik (Feedback) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Wahyuni, 2014 : 22).

Pada kenyataannya masih terdapat instansi-instansi pemerintah yang belum mengimplementasikan transparansi tersebut seperti dalam hasil laporan, masyarakat masih merasakan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Halim dan Kusufi (2016 : 48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Menurut Nafarin (2013 : 11) Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Sasongko dan Parulin (2015 : 2) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Bhakti, dkk (2015 : 32) Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam

mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012 : 64) Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016 : 129) Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Krismiaji (2015 : 218) Pengendalian Internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Menurut Hery (2013 : 159) Pengendalian Internal adalah Seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalagunaan menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sistem

Menurut Susanto (2013 : 22) adalah Sistem adalah kumpulan atau group dari sistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik atau pun *non* fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Yakub (2012 : 1) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Menurut Alexander (2014 : 2) yang dialih bahasa oleh Mardi adalah Suatu group dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang menunjukan suatu kumpulan saling berhubungan di antaranya dan berinteraksi bersama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.

Pengembangan Hipotesis

Kejelasan Sasaran Anggaran adalah gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti Pratiwy (2013 : 98) menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian Anjarwati (2012 : 5) menemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengendalian Internal adalah organisasi, metode dan ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian yakni menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan sebuah informasi akuntansi, memperbaiki efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penelitian ini yang dilakukan Setiawan (2013 : 13) dan Wahyuni (2014 : 20) menunjukan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Pelaporan adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyuni (2014 : 20) dan Anjarwati (2012 : 5) menunjukan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan dalam penelitian Eko (2013 : 13) menemukan Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H₃ : Secara simultan Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah sub bagian perencanaan dan keuangan di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan yaitu Kantor Camat Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rumus Slovin : } \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan : n = Jumlah

N = Populasi

e = Presisi ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan dan 90 % tingkat error

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 pegawai, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = 50 / (1+50(0,1)^2)$$

$$n = 50 / 1+50(0,01)$$

$$n = 50 / 1,5$$

$$n = 33,3$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel adalah 33,3 yang dibulatkan menjadi 33 pegawai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran data (N) sebanyak 39 memiliki nilai minimum sebesar 21,00 dengan nilai maksimum sebesar 30,00 dan rata-rata (*mean*) sebesar 26,05 sedangkan standar deviasi sebesar 2,406.

Variabel Pengendalian Internal dengan jumlah data (N) sebanyak 39 memiliki nilai minimum sebesar 28,00 dengan nilai maksimum sebesar 50,00 dan rata-rata (*mean*) sebesar 42,74 sedangkan standar deviasi sebesar 2,441. Variabel Sistem Pelaporan dengan jumlah data (N) sebanyak 39 memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dengan nilai maksimum sebesar 30,00 dan rata-rata (*mean*) sebesar 25,23 sedangkan standar deviasi sebesar 2,795. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan jumlah data (N) sebanyak 39 memiliki nilai minimum sebesar 22,00 dengan nilai maksimum sebesar 40,00 dan rata-rata (*mean*) sebesar 34,13 sedangkan standar deviasi sebesar 3,650.

Tabel 1 . Nilai Minimum, Maximum, Mean dan Standard Deviation

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Anggaran (X ₁)	39	21.00	30.00	26.05	2.406
Pengendalian Internal (X ₂)	39	28.00	50.00	42.74	4.441
Sistem Pelaporan (X ₃)	39	18.00	30.00	25.23	2.795
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	39	22.00	40.00	34.13	3.650
Valid N (listwise)	39				

Sumber : *Output SPSS Versi 25, 2019*

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian selanjutnya adalah teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas (X) dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,621 - 0,094 (X_1) + 0,367 (X_2) + 0,600 (X_3)$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.621	.337			1.844	.074
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.094	.130	-.083		-.724	.474
	Pengendalian Internal	.367	.093	.429		3.940	.000
	Sistem Pelaporan	.600	.124	.613		4.852	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : *Output SPSS Versi 25, 2019.*

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian pada tabel di atas, besar nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,023 dan signifikan pada $0,023 > 0,0005$ hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

Tabel.3 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18283876
	Absolute	,152
Most Extreme Differences	Positive	,152
	Negative	-,091
Kolmogorov-Smirnov Z		,152
Asymp. Sig. (2-tailed)		,023 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS Versi 25, 2019.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan masing-masing variabel independen (Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dengan nilai VIF < 10. Hasil perhitungan nilai VIF Kejelasan Sasaran Anggaran $2,870 < 10$, Pengendalian Internal $2,580 < 10$, dan Sistem Pelaporan sebesar $3,473 < 10$, maka dapat diinterpretasikan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized		Standardized		Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	T			
:(Constant)	.621	.337		1.844	.074		
Kejelasan Sasaran Anggaran	-.094	.130	-.083	-.724	.474	.348	2.870
Pengendalian Internal	.367	.093	.429	3.940	.000	.388	2.580
Sistem Pelaporan	.600	.124	.613	4.852	.000	.288	3.473

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Output SPSS Versi 25, 2019.

Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Berdasarkan tabel 5, analisis koefisien korelasi berganda diketahui bahwa nilai koefisien berganda (R) sebesar 0,916, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada di interval koefisien 0,80 – 1,00 artinya hubungan antara variabel tersebut sangat kuat.

Tabel 5. Koefisien Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.839	.825	.19051

a. Predictors: (Constant), kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan

b. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber : *Output SPSS Versi 25, 2019.*

Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Analisis Koefisien Determinasi (*R²*) mengukur kemampuan variabel), kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dalam menjelaskan variasi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam regresi linear berganda *Adjusted R Square (Adjusted R²)*. Berdasarkan tabel 5, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,825 artinya 82,5% variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan sedangkan sisanya 17,5% (1-0,825) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ketaatan pada peraturan perundangan, penyajian laporan keuangan, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi disiplin kerja dan partisipasi anggaran.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dapat dinyatakan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang lebih besar dari 0,474 ($0,00 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} (-0,724) > t_{tabel} (-2,02)$. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Netty Herawaty (2011) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bila kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan semakin kecil, maka semakin kecil pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dapat dinyatakan bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi variabel Pengendalian Internal yang lebih kecil dari 0,00 ($0,00 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} (3,940) > t_{tabel} (2,028)$. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti (2014), Cahyani dan Utama (2015) dan Haru Setyawan (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pengendalian internal proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya demi meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dapat dinyatakan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi variabel Sistem Pelaporan yang lebih besar dari 0,000 ($0,00 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} (4,852) > t_{tabel} (2,028)$. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayatullah (2015) dan Herawaty (2011) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke dan Pemerintah Kota Jambi. Kusumaningrum (2013) menyebutkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara sistem pelaporan dengan AKIP, hal ini memberikan gambaran bahwa semakin cepat sistem pelaporan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah dan sebaliknya semakin rendah sistem pelaporan maka akan semakin rendah akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem pelaporan yang baik dapat memantau dan mengendalikan kinerja aparat dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Besarnya nilai *Adjusted R*² sebesar 0,825 artinya 82,5% variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan sedangkan sisanya 17,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ketaatan pada peraturan perundangan, penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi disiplin kerja dan partisipasi anggaran.

SIMPULAN

Secara parsial, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena Bila kejelasan sasaran anggaran. Serta secara parsial Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta secara parsial Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi disiplin kerja dan partisipasi anggaran serta dapat menambah sampel untuk memperluas wilayah penelitian.

REFERENSI

- Bhakti, D. C., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 29-43.
- Gayatri, I. A., Astika, I. B. P., & Suputra, I. D. (2016). Kepemilikan Manajerial dan Modal Intelektual sebagai Prediktor Perataan Laba dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3231-3266.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hazmi, Y., Imran, A., Zuarni, Y. I., & Safrizal, S.H. (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe*,

Vol.13 No.2, Hal 67, E-ISSN: 1693-8852. Agustus (2012). Aceh Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lhokseumawe.

- Hery. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), Cetakan Pertama*. Jakarta: CAPS.
- Kaltsum, U., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), 215-228.
- Krismiaji, K. (2015), *Sistem Informasi Akuntansi*, Unit Penerbit, Yogyakarta.
- Mardi, M. (2014), *Sistem Informasi Akuntansi, Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyadi, M. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi, M. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Nadirsyah, N. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah*. Vol.3, No.1, ISSN: 0852-9124. Juli (2012). Aceh: Jurusan ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sasongko, S., & Parulian, P. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratna, S. V. (2015). *Akuntansi Biaya Teori & Penerapannya*. Yogyakarta: penerbit Pustaka Baru Press.
- Yakub, Y. (2012). *Pengantar Sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.